



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 - Jakarta 10110  
Telp : (021) 31926519, [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) email  
[ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id](mailto:ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id)

---

**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BINA**  
**ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**  
**PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT ASISTENSI**  
**KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR**  
**SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT**  
**JAKARTA, 4 S.D 6 APRIL 2019**

---

- YTH. SAUDARA PARA PEJABAT KEMENTERIAN DAN  
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN;**
- YTH. SAUDARA PARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA  
KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT;**
- YTH. PARA PEMBICARA/NARASUMBER;**
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA;**

**ASSALAMU'ALAIKUM  
WABARAKATUH,**

**WARAHMATULLAHI**

**PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS SEGALA RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA DAPAT HADIR BERSAMA-SAMA DI TEMPAT INI DALAM ACARA RAPAT ASISTENSI KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT, DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.**

**SAUDARA-SAUDARA YANG BERBAHAGIA,**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGAMANATKAN BAHWA GUBERNUR MERUPAKAN WAKIL PEMERINTAH PUSAT YANG MEMILIKI TUGAS DAN WEWENANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

**TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENJADI SANGAT STRATEGIS SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMBANGUN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SERTA PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG LEBIH BAIK.**

**PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIPERKUAT DENGAN MENINGKATKAN PERAN SIMPUL PENTING KOORDINASI, ANTARA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAUPUN KOTA. SIMPUL PENTING DIMAKSUD MELIPUTI FUNGSI MENGKONSOLIDASIKAN PROGRAM KEMENTERIAN ATAUPUN LEMBAGA DI TINGKAT PUSAT KE DAERAH, SERTA MEMFASILITASI DAN MENANGANI DENGAN BAIK PERMASALAHAN YANG BERSIFAT LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA.**

**TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TELAH MEMBERIKAN ARAH BAGI TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT. SALAH SATU**

**HARAPAN BESAR DENGAN SEMAKIN KUATNYA KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT ADALAH TERCIPTANYA SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DENGAN MENGACU PADA VISI DAN MISI PRESIDEN YANG TERTUANG DALAM NAWACITA.**

**PESERTA RAPAT YANG SAYA HORMATI,  
DALAM MENDUKUNG TERSELENGGARANYA TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PERLU ADANYA DUKUNGAN PEMBIAYAAN YANG BAIK DAN OPTIMAL. PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2014 MENYATAKAN BAHWA PENDANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIBEBANKAN PADA APBN MELALUI MEKANISME DEKONSENTRASI.**

**PEMBIAYAAN KEGIATAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019, DIBEBANKAN PADA DIPA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK**

**KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.**

**KEGIATAN INI DILAKSANAKAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 118-094 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019. PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS DISUSUN SEBAGAI ACUAN UNTUK MEMPERMUDAH DAN MENJELASKAN SECARA TEKNIS TENTANG KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019, AGAR DAPAT SESUAI DENGAN SASARAN KEGIATAN YANG TELAH DITETAPKAN.**

**PERLU DISAMPAIKAN, BAHWA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019 SEBESAR RP. 7.000.000.000,- YANG DIALOKASIKAN KE SELURUH 34 PROVINSI. PADA TAHUN INI, PEMBIAYAAN DIFOKUSKAN PADA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN/KOTA.**

**PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019 BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, SERTA TERJALINNYA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG LEBIH INTENSIF ANTAR PERANGKAT DAERAH YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI YANG BERSESUAIAN DAN/ATAU MELAKSANAKAN PERAN GANDA SEBAGAI PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.**

**HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019, SEBAGAI BERIKUT:**

- 1. TERSELENGGARANYA SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT, KHUSUSNYA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-**

**UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH.**

- 2. TERSUSUNNYA LAPORAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS  
PEMBANTUAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH  
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.**
- 3. TERSUSUNNYA DATA PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA SERTA  
PERMASALAHANNYA.**

**HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

**DALAM KESEMPATAN INI, SAYA JUGA INGIN  
MEMBERIKAN APRESIASI TERHADAP PELAKSANAAN  
KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN  
ANGGARAN 2018. REALISASI PENYERAPAN  
ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN  
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (PER  
31 DESEMBER 2018) SEBESAR 83,76 %.**

**NILAI REALISASI TERSEBUT MERUPAKAN ANGKA  
YANG CUKUP BAIK MESKIPUN MASIH KURANG  
OPTIMAL KARENA TERDAPAT 2 (DUA) PROVINSI YANG  
TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN. SAYA BERHARAP**

**HAL YANG MENJADI KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU DAPAT MENJADI PEMBELAJARAN BAGI PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN INI.**

**AKAN TETAPI, HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PADA KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT MASIH MENINGGALKAN POTENSI TEMUAN. HAL TERSEBUT DAPAT MENJADI PEMBELAJARAN BERSAMA UNTUK MEMPERBAIKI LAPORAN MANAJERIAL DAN AKUNTABILITAS. SEHINGGA TIDAK AKAN ADA LAGI POTENSI TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TERHADAP KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019.**

**PESERTA RAPAT YANG SAYA HORMATI,  
SAYA BERHARAP SAUDARA DAPAT MEMANFAATKAN FORUM RAPAT INI UNTUK SALING BERKOORDINASI DAN BERKOMUNIKASI BAIK YANG BERSIFAT TEKNIS SUBSTANTIF MAUPUN**



**ADMINISTRATIF TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT YANG NANTINYA AKAN SAUDARA-SAUDARA LAKSANAKAN.**

**SEBELUM MENGAKHIRI ARAHAN INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA HARAPAN ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. TERWUJUDNYA PERSAMAAN PERSEPSI TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH SERTA MENGOPTIMALKAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAIMANA AMANAT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PP 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT;**
- 2. SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK TERUS MEMBANGUN KEBANGGAAN BERSAMA DAN RASA MEMILIKI TERHADAP TUGAS INI, DENGAN TERUS MENINGKATKAN KEKOMPAKAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA, BILA SPIRIT INI TUMBUH DI SELURUH**

**KAJARIAN BAIK PADA SATKER PEMBINA MAUPUN SKPD PELAKSANA, BUKAN TIDAK MUNGKIN BERBAGAI MASALAH YANG DIHADAPI DAPAT TERSELESAIKAN DENGAN BAIK SEHINGGA CAPAIAN KINERJA DAPAT TERLAKSANA SECARA OPTIMAL, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;**

- 3. LAKSANAKAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN MENYUSUN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (*DISBURSEMENT PLAN*) YANG DISERTAI DENGAN RENCANA PENGADAAN (*PROCUREMENT PLAN*) YANG SISTEMATIS, SERTA TINGKATKAN KOORDINASI DENGAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN DAERAH;**
- 4. BENAHI SEGALA KEKURANGAN DALAM PENGADMINISTRASIAN KEGIATAN, SAYA BERHARAP KIRANYA PELAKSANAAN TUGAS YANG AKAN DIEMBAN MAMPU MEMBERIKAN IKLIM *GOOD GOVERNANCE* SEHINGGA PRESTASI TAHUN INI SEMAKIN BAIK DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA DAN AGAR SENANTIASA MENYAMPAIKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN**

**KINERJA, MANAJERIAL DAN KEUANGAN YANG BERBENTUK STANDAR AKUNTANSI INSTANSI DAN ASSET BARANG SECARA BERKALA (TRIWULAN) KEPADA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DAN INSTANSI TERKAIT SESUAI WAKTU YANG DITETAPKAN;**

- 5. MENJALIN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI AKTIF DENGAN SATKER PEMBINA TERKAIT SEGALA BENTUK HAMBATAN, PERUBAHAN, PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.**

**SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI,**

**DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN RAPAT INI, DAN SAYA MENGHARAPKAN MASUKAN DAN SARAN SEBAGAI BAHAN OPTIMALISASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PADA TAHUN INI DAN TAHUN TAHUN MENDATANG. PADA KESEMPATAN RAPAT INI PULA SAYA MENGHARAPKAN TERWUJUD PENYAMAAN PERSEPSI DAN MEMPERKUAT PEMAHAMAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR**


**SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SETELAH TERBITNYA PP 33 TAHUN 2018.**

**DEMIKIAN HAL-HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN RAPAT INI. AKHIR KATA, DENGAN MENGUCAPKAN “BISMILLAHHIROHMAANIRROHIM”, RAPAT ASISTENSI KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SECARA RESMI DI BUKA.**

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH.**

**WASSALAMU’ALAIKUMWARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH.**

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI  
KEWILAYAHAN,**



**EKO SUBOWO**

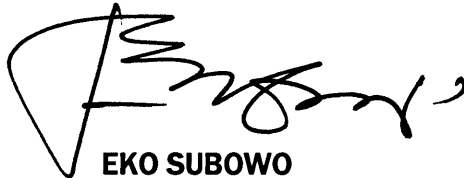
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SETELAH TERBITNYA PP 33 TAHUN 2018.

DEMIKIAN HAL-HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN RAPAT INI. AKHIR KATA, DENGAN MENGUCAPKAN "BISMILLAHHIROHMAANIRROHIM", RAPAT ASISTENSI KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SECARA RESMI DI BUKA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUMWARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH.

DIREKTUR JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI  
KEWILAYAHAN,



EKO SUBOWO

✓

10

1.	
2.	SR
3.	KAN
4.	STAF

R  
AS